

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022	12
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA	12
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA	33
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	33
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	35
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB V PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan pada posisi 2° 05' LU - 3° 05' LS dan 108° 0' BT - 114° 10' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Bagian barat berbatasan dengan Natuna dan Selat Karimata;
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur);
3. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
4. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 147.307 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 kilometer dan sekitar 850 kilometer dari barat ke timur. Bagian lain adalah perairan laut yang mempunyai puluhan pulau-pulau. Pulau-pulau besar adalah Pulau Karimata dan Pulau Maya. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat



termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (421.891 Km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 Km²), sedangkan Kalimantan Timur menjadi keempat (129.873 Km²) setelah dikurangi Kalimantan Utara.

Secara Administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 Desa, sedangkan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 5.364.964 juta jiwa, yang terdiri dari 2.762.930 jiwa atau 51,55% berjenis kelamin laki-laki dan 2.602.034 jiwa atau 48,45% berjenis kelamin perempuan.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti, Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru (Jatim,3.676



M) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 M). Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet



merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Pada umumnya di Kalimantan Barat suhu udara yang tinggi biasa diikuti oleh kelembaban udara yang tinggi pula. Umumnya suhu udara di Kalimantan Barat cukup normal namun bervariasi, yaitu rata-rata sekitar 20^o sampai dengan 35^oC. . Kecepatan angin rata-rata di Kalimantan Barat, berkisar antara 2-8 knot/jam. Sedangkan angin rata-rata bulanan sekitar 2 knot/jam. Kecepatan angin yang relative tinggi sering terjadi antara bulan Oktober-Maret, seiring dengan musim penghujan. Kalimantan Barat cukup dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Secara umum mempunyai curah hujan tahunan di atas 3.000 milimeter dan hampir merata diseluruh Kabupaten/Kota. Intensitas hujan yang tinggi, biasanya saling mempengaruhi terhadap kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan dan kegiatan nelayan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh daerahnya yang berhutan tropis yang lebat dan disertai dengan kelembaban udara yang tinggi. Angin kencang yang secara temporer biasanya terjadi di laut dengan kecepatan dapat mencapai 30-60 knot/jam.

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama



penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. **Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek **tanggap darurat**, tetapi lebih menekankan pada **keseluruhan manajemen risiko bencana**. Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana serta 3 buah peraturan turunannya, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat pusat dan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan



penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sejak dibentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat secara optimal telah melaksanakan tugas pokok, fungsi serta peranannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat.

Berkaitan dengan sebagian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana dengan Indeks Rawan Bencana tinggi atau sebagai kawasan rawan bencana, maka Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak.

Untuk mengoptimalkan kinerja penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, maka pembangunan bidang kebencanaan diarahkan untuk :

- a. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana kedalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah;



- b. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; serta
- c. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.

Program dan kegiatan tersebut tertuang didalam Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Keuangan dan Anggaran (RKA).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumberdaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun yang menjadi Maksud dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi Pedoman dan Dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
2. Menjadi Acuan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran atas Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 dalam bentuk Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024
2. Menyelaraskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan program nasional di bidang kebencanaan, program dan kegiatan kabupaten/kota, isu – isu strategis, usulan – usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kebencanaan



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

- III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.4. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. EVALUASI TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Berdasarkan data titik hotspot yang diperoleh dari Lembaga Antariksa Kalimantan Barat (LAPAN) (<http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/>) sebagai sistem monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan diperoleh data hotspot sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Data Hotspot Tahun 2020-2022

No	Bulan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Januari	6	6	48
2.	Februari	7	64	31
3.	Maret	2	15	200
4.	April	4	5	246
5.	Mei	8	0	214
6.	Juni	1	5	59
7.	Juli	111	223	687
8.	Agustus	123	1.902	7.655
9.	September	281	249	16.285
10.	Oktober	11	14	433
11.	November	0	0	450
12.	Desember	4	1	17
	Jumlah	558	2.484	26.325

(Sumber data: Satelit Lapan)

Sebagaimana terlihat pada table 4.1. untuk tahun 2021 titik hotspot yang terjadi lebih besar atau meningkat sangat signifikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh:



- El Niño atau pemanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan sebagian besar daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kurangnya curah hujan;
- Indian Ocean Dipole Positif atau fenomena interaksi antara atmosfer dan lautan yang menyebabkan variabilitas iklim antar tahunan di Samudera Hindia dan iklim sekitarnya, hal tersebut juga menyebabkan terjadinya kekeringan di sebagian besar wilayah di Indonesia pada bulan Mei dan Juni serta puncaknya pada bulan Oktober;
- Melambatnya perubahan angin timur (kering) ke angin barat (basah) yang menyebabkan gambut, semak dan pohon mengering dan mudah terbakar.

b. Status Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 disebutkan bahwa Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Pernyataan status bencana, amat penting dalam menentukan penyaluran dan pencairan anggaran untuk membantu penanganan darurat bencana, seperti pendistribusian logistik bencana dan pencairan dana siap pakai (oncall) baik di Pusat maupun di Daerah.

Dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat Karhutla, untuk Tahun 2019 Gubernur Kalimantan Barat telah mengeluarkan Status Bencana yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 155/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan pembentukan komando siaga darurat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan



Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019.

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana yang disiapkan untuk penanggulangan bencana asap akibat KARHUTLA yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.9.705.964.854,-** yang terdiri dari kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi senilai Rp. 7.718.841.904,- dan Kegiatan Penanggulangan Bencana senilai Rp. 1.987.122.950,-

d. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana

Pada Tahun 2022 bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) sangat dominan dibanding bencana lain di Kalimantan Barat, adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian bencana tersebut adalah:

- Pembentukan Pokmas / Relawan Peduli Bencana, Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana Asap dan pembinaan aparatur;
- Sosialisasi dan Penyuluhan (langsung ke masyarakat / media cetak & elektronik / medsos);
- Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi;
- Apel Kesiapsiagaan Karhutla;
- Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla;
- Memperbanyak desa mandiri yang tangguh bencana, sehingga desa mandiri tersebut siap sedia ikut serta didalam menghadapi bencana di desanya;
- Dengan dikeluarkannya pergub nomor 39 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah ada sebanyak 134 perusahaan diberikan surat peringatan, 15 perusahaan yang diterapkan sanksi administrasi, 30 perusahaan yang disegel oleh penegakan hukum klhk, 18 perusahaan yang disegel polda kalimantan barat, 8 perusahaan yang disegel penegakan hukum klhk bersama tim provinsi kalimantan barat, 45 perusahaan yang disegel, serta 5 perusahaan yang sudah dinaikkan ketahap sidik. (sesuai



surat gubernur kalimantan barat nomor : 660.1/2995/dprkplh-b tanggal 23 september 2019 perihal laporan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pemerintah provinsi kalimantan barat);

- SATGAS UDARA (Brifing Malam dan Pagi, Patroli, Water Bombong dan TMC);
- SATGAS DARAT (Patroli dan Pemadaman Darat);
- Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC);
- Pembagian masker kepada masyarakat dan pelajar.

e. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menangani Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi Penanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Lembaga setingkat Kementerian, sedangkan di daerah tiap Pemerintah Daerah juga wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur atau setingkat Eselon Ib, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon IIa.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, maka di keluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2016.



Selain itu sesuai peraturan dan perundang-undangan dan tupoksinya terdapat instansi instansi teknis yang juga terlibat dalam penanggulangan bencana antara lain TNI, POLRI, BMKG, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BASARNAS, serta lembaga khusus dari unsur masyarakat yang dibentuk oleh BBNPB/BPBD untuk membantu dalam menanggulangi bencana seperti Desa Tangguh Bencana atau Kelompok Masyarakat Relawan Bencana dan lain-lain.

f. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

Untuk penanganan bencana asap akibat KARHUTLA tahun 2022 Gubernur Kalimantan Barat membentuk tim penanganan bencana, yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 156/BPBD/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2019, instansi yang terlibat dalam susunan keanggotaan Komando sebagaimana terlihat pada table 4.2 dibawah ini:

Tabel 2.2. Susunan Keanggotaan Komando

No	Jabatan Pokok	Kedudukan
1	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah
2	Panglima KODAM XII/Tanjungpura	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	Pengarah
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	Pengarah
5	Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengarah
6	Komandan Lanud Supadio Pontianak	Pengarah
7	Komandan Lantamal XII Pontianak	Pengarah
8	Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
9	Inspektur Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
10	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
11	Wakil Gubernur Kalimantan Barat	Komandan
12	Komandan Korem 121/ABW	Wakil Komandan
13	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
14	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas Karhutla



No	Jabatan Pokok	Kedudukan
		Polda Kalbar
15	Koordinator DAOPS Manggala Agni Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
16	Kadis Ops Lanud Supadio Pontianak	Kepala Bidang Satgas Operasi Udara
17	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas TMC
18	Kepala Kantor Wilayah Urusan Agama Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas Doa Minta Hujan
19	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas Water Boombing
20	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
21	Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Media Center
22	Bendahara DSP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Keuangan
23	Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang Administrasi

Sedangkan untuk susunan keanggotaan Komando dapat dilihat sebagaimana tabel 4.3. dibawah ini:

Tabel 2.3. Susunan Keanggotaan Komando

NO.	NAMA SKPD/BADAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMANDO
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Koordinator Instansi/ Lembaga
2.	TNI AD KODAM XII/TANJUNGPURA	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
3.	LANTAMAL XII Pontianak	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
4.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
6.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
7.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
8.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
9.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat



NO.	NAMA SKPD/BADAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMANDO
10.	PTPN XIII (Persero)	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
11.	Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
12.	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
13.	TAGANA/ Kelompok Masyarakat (POKMAS)/ Masyarakat Peduli Api (MPA)/ Pramuka Kalimantan	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
14.	Asosiasi Pemadam Kebakaran Swasta	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
15.	Manggala Agni Kalimantan Barat - BPPIKHL Wilayah Kalimantan	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
17.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
18.	Lembaga/Organisasi terkait di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Desa	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
19.	Kantor Wilayah Hukum dan Ham / Imigrasi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
20.	Bea dan Cukai Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Patroli dan Pemadaman Darat
21.	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	Anggota Satgas Karhutla Polda
22.	TNI AU LANUD Supadio Pontianak	Anggota Satgas TMC
23.	Lembaga Antariksa Kalimantan Barat (LAPAN)	Anggota Satgas TMC
24.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Anggota Satgas TMC
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan	Anggota Satgas TMC
26.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Anggota Satgas Media Center
27.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Media Center
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Anggota Satgas Media Center
29.	PT. (Persero) PLN Wilayah V Kalimantan Barat	Anggota Satgas Media Center
30.	Kejaksanaan Tinggi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
31.	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
32.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
33.	Rumah Sakit Umum dr. Soedarso Pontianak	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
34.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
35.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
36.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas



NO.	NAMA SKPD/BADAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMANDO
37.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
38.	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
39.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
40.	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
41.	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
42.	Univeritas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
43.	PT. (Persero) Angkasa Pura II Supadio Pontianak	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
44.	Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
45.	Wahana Visi Indonesia (WVI)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
46.	Pontianak Post, Tribune Pontianak, Suara Kalbar, Suara Pemred Kalbar, TVRI, RUAITV, PONTV,	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
47.	Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
48.	DAD (Dewan Adat Dayak)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
49.	MABM (Majelis Adat Budaya Melayu)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
50.	MABT (Majelis Adat Budaya Tionghua)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
51.	KNPI Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
52.	IDI (Ikatan Dokter Indonesia)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
53.	FAD (Forum Anak Daerah) Kalimantan Barat	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
54.	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
55.	HIPGABI (Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia)	Anggota Satgas Sosialisasi dan Pemberdayaan Pokmas
56.	Kantor Wilayah Urusan Agama Provinsi Kalimantan	Anggota Satgas Doa Minta
57.	ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta
58.	ISKA (Ikatan Sarjana Katolik)	Anggota Satgas Doa Minta
59.	PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta
60.	PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik)	Anggota Satgas Doa Minta
61.	Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI)	Anggota Satgas Doa Minta
62.	GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta



NO.	NAMA SKPD/BADAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMANDO
63.	GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta
64.	Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Kalimantan Barat	Anggota Satgas Doa Minta
65.	PGLII (Persatuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injil Indonesia) Kalimantan Barat	Anggota Satgas Doa Minta Turun Hujan
66.	KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta
67.	PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)	Anggota Satgas Doa Minta
68.	BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah) Provinsi Kalimantan Barat	Anggota Keuangan
69.	PT. (Persero) Bank Kalimantan Barat	Anggota Keuangan
70.	Bank Indonesia (BI)	Anggota Keuangan

g. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Kegiatan penanganan bencana ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

- BPBD Provinsi	: 52 orang
- BMKG	: 10 orang
- SATPOL PP	: 10 orang
- BPBD Kabupaten Kubu Raya	: 20 orang
- BPBD Kabupaten Mempawah	: 20 orang
- BPBD Kabupaten Sintang	: 20 orang
- TNI Angkatan Darat	: 100 orang
- TNI Angkatan Laut	: 20 orang
- TNI Angkatan Udara	: 20 orang
- POLRI	: 100 orang
- Kelompok Masyarakat (POKMAS)	: 150 orang

h. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Sesuai dengan kondisi alam yang ada, berdasarkan informasi dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada bulan April sampai dengan Oktober 2022 Provinsi Kalimantan Barat masih berada dalam masa kekeringan sehingga berpotensi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.



Berdasarkan pemetaan daerah rawan bencana, terdapat 180 desa rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang setiap tahunnya diperkirakan akan terjadi terjadi secara berulang dan mengakibatkan bencana asap, sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Maret diperkirakan curah hujan cukup tinggi dan berpotensi menyebabkan banjir begitu pula pada bulan November dan Desember.

B. EVALUASI TERHADAP REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan adalah siklus terakhir dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan seluruh masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar yang merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah juga berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Capaian Kinerja Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menganggarkan melalui APBD Tahun 2022 untuk sasaran pokok melalui program prioritas BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Secara rinci besarnya anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.415.930,00	5.583.112.160,00	239.303.770,00	95,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.598.210.730,00	5.362.453.360,00	235.757.370,00	95,79
BELANJA OPERASI	5.598.210.730,00	5.362.453.360,00	235.757.370,00	95,79
Belanja Pegawai	5.598.210.730,00	5.362.453.360,00	235.757.370,00	95,79

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.125.231.979,00	2.966.802.004,00	158.429.975,00	94,93
Belanja Gaji Pokok ASN	2.306.186.411,00	2.173.706.575,00	132.479.836,00	94,26
Belanja Gaji Pokok PNS	2.306.186.411,00	2.173.706.575,00	132.479.836,00	94,26
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	224.361.200,00	223.412.554,00	948.646,00	99,58
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	224.361.200,00	223.412.554,00	948.646,00	99,58
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	128.222.500,00	124.880.000,00	3.342.500,00	97,39
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.222.500,00	124.880.000,00	3.342.500,00	97,39
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.480.000,00	61.180.000,00	300.000,00	99,51
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	61.480.000,00	61.180.000,00	300.000,00	99,51
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.797.000,00	67.295.000,00	502.000,00	99,26
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.797.000,00	67.295.000,00	502.000,00	99,26
Belanja Tunjangan Beras ASN	123.971.900,00	123.331.260,00	640.640,00	99,48
Belanja Tunjangan Beras PNS	123.971.900,00	123.331.260,00	640.640,00	99,48
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.471.200,00	4.526.253,00	944.947,00	82,73
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.471.200,00	4.526.253,00	944.947,00	82,73
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.901.968,00	28.494,00	1.873.474,00	1,50
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.901.968,00	28.494,00	1.873.474,00	1,50
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	174.526.700,00	170.551.595,00	3.975.105,00	97,72
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	174.526.700,00	170.551.595,00	3.975.105,00	97,72
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.806.900,00	4.472.546,00	334.354,00	93,04
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.806.900,00	4.472.546,00	334.354,00	93,04
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.096.700,00	13.417.727,00	1.678.973,00	88,88
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.096.700,00	13.417.727,00	1.678.973,00	88,88
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	11.409.500,00	0,00	11.409.500,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.409.500,00	0,00	11.409.500,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.472.978.751,00	2.395.651.356,00	77.327.395,00	96,87
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.472.978.751,00	2.395.651.356,00	77.327.395,00	96,87
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.472.978.751,00	2.395.651.356,00	77.327.395,00	96,87
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.460.000,00	189.150.000,00	3.310.000,00	98,28
BELANJA OPERASI	192.460.000,00	189.150.000,00	3.310.000,00	98,28
Belanja Pegawai	188.260.000,00	184.950.000,00	3.310.000,00	98,24
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	188.260.000,00	184.950.000,00	3.310.000,00	98,24
Belanja Honorarium	171.160.000,00	167.850.000,00	3.310.000,00	98,07
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.880.000,00	155.880.000,00	0,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.280.000,00	11.970.000,00	3.310.000,00	78,34
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.354.200,00	6.354.200,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	6.354.200,00	6.354.200,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	6.354.200,00	6.354.200,00	0,00	100,00
Belanja Barang	2.504.200,00	2.504.200,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.504.200,00	2.504.200,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	929.400,00	929.400,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	644.800,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.025.400,00	4.025.400,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	4.025.400,00	4.025.400,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4.025.400,00	4.025.400,00	0,00	100,00
Belanja Barang	4.025.400,00	4.025.400,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.025.400,00	4.025.400,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	440.800,00	440.800,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.259.800,00	1.259.800,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	644.800,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.480.800,00	19.244.400,00	236.400,00	98,79
BELANJA OPERASI	19.480.800,00	19.244.400,00	236.400,00	98,79
Belanja Barang dan Jasa	19.480.800,00	19.244.400,00	236.400,00	98,79
Belanja Barang	2.080.800,00	1.844.400,00	236.400,00	88,64
Belanja Barang Pakai Habis	2.080.800,00	1.844.400,00	236.400,00	88,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	719.600,00	719.600,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	644.800,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.884.800,00	1.884.800,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	1.884.800,00	1.884.800,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.884.800,00	1.884.800,00	0,00	100,00
Belanja Barang	1.884.800,00	1.884.800,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.884.800,00	1.884.800,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	220.400,00	220.400,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.019.600,00	1.019.600,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	644.800,00	644.800,00	0,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.001.600,00	2.355.900,00	2.645.700,00	47,10
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.556.700,00	1.556.700,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	1.556.700,00	1.556.700,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.556.700,00	1.556.700,00	0,00	100,00
Belanja Barang	1.556.700,00	1.556.700,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.556.700,00	1.556.700,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	486.400,00	486.400,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	545.300,00	545.300,00	0,00	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	837.600,00	0,00	837.600,00	0,00
BELANJA OPERASI	837.600,00	0,00	837.600,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	837.600,00	0,00	837.600,00	0,00
Belanja Barang	837.600,00	0,00	837.600,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	837.600,00	0,00	837.600,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	113.600,00	0,00	113.600,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.535.600,00	799.200,00	736.400,00	52,04
BELANJA OPERASI	1.535.600,00	799.200,00	736.400,00	52,04
Belanja Barang dan Jasa	1.535.600,00	799.200,00	736.400,00	52,04
Belanja Barang	1.535.600,00	799.200,00	736.400,00	52,04
Belanja Barang Pakai Habis	1.535.600,00	799.200,00	736.400,00	52,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	436.400,00	0,00	436.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	799.200,00	799.200,00	0,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00	0,00
BELANJA OPERASI	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00	0,00
Belanja Barang	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	146.400,00	0,00	146.400,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	754.900,00	0,00	754.900,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.871.900,00	27.111.700,00	6.760.200,00	80,04
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.329.800,00	9.084.600,00	245.200,00	97,37
BELANJA OPERASI	9.329.800,00	9.084.600,00	245.200,00	97,37
Belanja Barang dan Jasa	9.329.800,00	9.084.600,00	245.200,00	97,37
Belanja Barang	3.729.800,00	3.484.600,00	245.200,00	93,43
Belanja Barang Pakai Habis	3.729.800,00	3.484.600,00	245.200,00	93,43
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.900,00	132.900,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	520.100,00	520.100,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	431.600,00	431.600,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.542.100,00	4.542.100,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	4.542.100,00	4.542.100,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4.542.100,00	4.542.100,00	0,00	100,00
Belanja Barang	4.542.100,00	4.542.100,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.542.100,00	4.542.100,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	124.900,00	124.900,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	245.200,00	245.200,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	740.400,00	740.400,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	431.600,00	431.600,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
Belanja Jasa	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	9.975.000,00	25.000,00	99,75
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	3.510.000,00	6.490.000,00	35,10
BELANJA OPERASI	10.000.000,00	3.510.000,00	6.490.000,00	35,10
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	3.510.000,00	6.490.000,00	35,10
Belanja Jasa	10.000.000,00	3.510.000,00	6.490.000,00	35,10
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	3.510.000,00	6.490.000,00	35,10
Belanja Sosialisasi	5.000.000,00	1.040.000,00	3.960.000,00	20,80
Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	2.470.000,00	2.530.000,00	49,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.884.300,00	355.324.902,00	34.559.398,00	91,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
BELANJA OPERASI	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
Belanja Barang dan Jasa	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
Belanja Barang	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
Belanja Barang Pakai Habis	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.999.800,00	9.975.800,00	24.000,00	99,76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.279.000,00	23.270.960,00	8.040,00	99,97
BELANJA OPERASI	23.279.000,00	23.270.960,00	8.040,00	99,97
Belanja Barang dan Jasa	23.279.000,00	23.270.960,00	8.040,00	99,97
Belanja Barang	23.279.000,00	23.270.960,00	8.040,00	99,97
Belanja Barang Pakai Habis	23.279.000,00	23.270.960,00	8.040,00	99,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.675.500,00	7.675.460,00	40,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.993.700,00	6.985.700,00	8.000,00	99,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.229.800,00	8.229.800,00	0,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
Belanja Barang	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.995.500,00	9.995.500,00	0,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	24.999.900,00	24.999.900,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.824.900,00	16.824.900,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	100,00

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.900.000,00	6.900.000,00	15.000.000,00	31,51
BELANJA OPERASI	21.900.000,00	6.900.000,00	15.000.000,00	31,51
Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	6.900.000,00	15.000.000,00	31,51
Belanja Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.565.000,00	253.237.642,00	8.327.358,00	96,82
BELANJA OPERASI	261.565.000,00	253.237.642,00	8.327.358,00	96,82
Belanja Barang dan Jasa	261.565.000,00	253.237.642,00	8.327.358,00	96,82
Belanja Barang	50.520.000,00	49.920.000,00	600.000,00	98,81
Belanja Barang Pakai Habis	50.520.000,00	49.920.000,00	600.000,00	98,81
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.720.000,00	45.720.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.800.000,00	4.200.000,00	600.000,00	87,50
Belanja Perjalanan Dinas	211.045.000,00	203.317.642,00	7.727.358,00	96,34
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	211.045.000,00	203.317.642,00	7.727.358,00	96,34
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	211.045.000,00	203.317.642,00	7.727.358,00	96,34
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.996.900,00	10.996.900,00	0,00	100,00
BELANJA OPERASI	10.996.900,00	10.996.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	10.996.900,00	10.996.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang	5.896.900,00	5.896.900,00	0,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	5.896.900,00	5.896.900,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.296.900,00	2.296.900,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.148.200,00	15.948.200,00	11.200.000,00	58,74
BELANJA OPERASI	27.148.200,00	15.948.200,00	11.200.000,00	58,74
Belanja Barang dan Jasa	27.148.200,00	15.948.200,00	11.200.000,00	58,74
Belanja Barang	7.148.200,00	5.948.200,00	1.200.000,00	83,21
Belanja Barang Pakai Habis	7.148.200,00	5.948.200,00	1.200.000,00	83,21
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.125.700,00	1.125.700,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	613.000,00	613.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.930.500,00	1.930.500,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00
Belanja Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.053.618,00	698.837.265,00	58.216.353,00	92,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
BELANJA OPERASI	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
Belanja Jasa	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
Belanja Paket/Pengiriman	590.200,00	0,00	590.200,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.960.144,00	124.505.455,00	31.454.689,00	79,83
BELANJA OPERASI	155.960.144,00	124.505.455,00	31.454.689,00	79,83
Belanja Barang dan Jasa	155.960.144,00	124.505.455,00	31.454.689,00	79,83
Belanja Jasa	155.960.144,00	124.505.455,00	31.454.689,00	79,83
Belanja Jasa Kantor	155.960.144,00	124.505.455,00	31.454.689,00	79,83
Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	1.282.269,00	217.731,00	85,48
Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	6.559.200,00	5.440.800,00	54,66
Belanja Tagihan Listrik	135.990.144,00	114.529.986,00	21.460.158,00	84,22
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.470.000,00	2.134.000,00	4.336.000,00	32,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.503.274,00	574.331.810,00	26.171.464,00	95,64
BELANJA OPERASI	600.503.274,00	574.331.810,00	26.171.464,00	95,64
Belanja Barang dan Jasa	600.503.274,00	574.331.810,00	26.171.464,00	95,64
Belanja Barang	37.540.000,00	34.200.000,00	3.340.000,00	91,10
Belanja Barang Pakai Habis	37.540.000,00	34.200.000,00	3.340.000,00	91,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.000.000,00	5.700.000,00	3.300.000,00	63,33
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.860.000,00	40.000,00	98,97
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	562.963.274,00	540.131.810,00	22.831.464,00	95,94
Belanja Jasa Kantor	546.612.464,00	523.781.000,00	22.831.464,00	95,82
Honorarium Rohaniwan	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	143.000.000,00	142.931.000,00	69.000,00	99,95
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	360.150.000,00	360.150.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan	31.962.464,00	9.700.000,00	22.262.464,00	30,35

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Pemotretan				
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	16.350.810,00	16.350.810,00	0,00	100,00
Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.406.000,00	14.406.000,00	0,00	100,00
Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	864.360,00	864.360,00	0,00	100,00
Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.080.450,00	1.080.450,00	0,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.240.000,00	551.448.756,00	17.791.244,00	96,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.320.000,00	153.582.256,00	3.737.744,00	97,62
BELANJA OPERASI	157.320.000,00	153.582.256,00	3.737.744,00	97,62
Belanja Barang dan Jasa	157.320.000,00	153.582.256,00	3.737.744,00	97,62
Belanja Jasa	34.000.000,00	30.988.000,00	3.012.000,00	91,14
Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	30.988.000,00	3.012.000,00	91,14
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.000.000,00	30.988.000,00	3.012.000,00	91,14
Belanja Pemeliharaan	123.320.000,00	122.594.256,00	725.744,00	99,41
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.320.000,00	122.594.256,00	725.744,00	99,41
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	123.320.000,00	122.594.256,00	725.744,00	99,41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.400.000,00	28.290.000,00	1.110.000,00	96,22
BELANJA OPERASI	29.400.000,00	28.290.000,00	1.110.000,00	96,22
Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	28.290.000,00	1.110.000,00	96,22
Belanja Pemeliharaan	29.400.000,00	28.290.000,00	1.110.000,00	96,22
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.400.000,00	28.290.000,00	1.110.000,00	96,22
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.800.000,00	12.700.000,00	1.100.000,00	92,03
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.600.000,00	15.590.000,00	10.000,00	99,94
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	9.987.000,00	13.000,00	99,87
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	35.000.000,00	34.944.000,00	56.000,00	99,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	337.520.000,00	324.645.500,00	12.874.500,00	96,19

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.294.500,00	205.500,00	99,25
Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.294.500,00	205.500,00	99,25
Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.294.500,00	205.500,00	99,25
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.500.000,00	27.294.500,00	205.500,00	99,25
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00	14.894.500,00	105.500,00	99,30
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00
BELANJA MODAL	310.020.000,00	297.351.000,00	12.669.000,00	95,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.020.000,00	48.314.000,00	11.706.000,00	80,50
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.130.000,00	14.097.000,00	33.000,00	99,77
Belanja Modal Alat Kantor	14.130.000,00	14.097.000,00	33.000,00	99,77
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.130.000,00	14.097.000,00	33.000,00	99,77
Belanja Modal Komputer	45.890.000,00	34.217.000,00	11.673.000,00	74,56
Belanja Modal Komputer Unit	45.890.000,00	34.217.000,00	11.673.000,00	74,56
Belanja Modal Personal Computer	45.890.000,00	34.217.000,00	11.673.000,00	74,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	249.037.000,00	963.000,00	99,61
Belanja Modal Bangunan Gedung	250.000.000,00	249.037.000,00	963.000,00	99,61
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	249.037.000,00	963.000,00	99,61
Belanja Modal Bangunan Parkir	250.000.000,00	249.037.000,00	963.000,00	99,61
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.987.122.950,00	1.853.262.532,00	133.860.418,00	93,26
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	806.627.950,00	733.563.317,00	73.064.633,00	90,94
Pengelolaan Risiko Bencana	226.190.600,00	196.925.220,00	29.265.380,00	87,06
BELANJA OPERASI	226.190.600,00	196.925.220,00	29.265.380,00	87,06
Belanja Barang dan Jasa	226.190.600,00	196.925.220,00	29.265.380,00	87,06
Belanja Barang	81.930.600,00	72.517.935,00	9.412.665,00	88,51
Belanja Barang Pakai Habis	81.930.600,00	72.517.935,00	9.412.665,00	88,51
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.229.000,00	30.588.355,00	8.640.645,00	77,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.267.700,00	2.267.680,00	20,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35.092.200,00	34.920.200,00	172.000,00	99,51
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.942.200,00	1.942.200,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00
Belanja Jasa	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	62.480.000,00	42.627.285,00	19.852.715,00	68,23
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.480.000,00	42.627.285,00	19.852.715,00	68,23
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.480.000,00	42.627.285,00	19.852.715,00	68,23
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	276.413.000,00	265.095.000,00	11.318.000,00	95,91
BELANJA OPERASI	276.413.000,00	265.095.000,00	11.318.000,00	95,91

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Belanja Barang dan Jasa	276.413.000,00	265.095.000,00	11.318.000,00	95,91
Belanja Barang	72.505.000,00	72.439.000,00	66.000,00	99,91
Belanja Barang Pakai Habis	72.505.000,00	72.439.000,00	66.000,00	99,91
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.636.100,00	2.636.100,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	799.500,00	799.500,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.042.500,00	3.976.500,00	66.000,00	98,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.186.900,00	1.186.900,00	0,00	100,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	100.600.000,00	90.496.000,00	10.104.000,00	89,96
Belanja Jasa Kantor	98.600.000,00	88.700.000,00	9.900.000,00	89,96
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.200.000,00	79.300.000,00	9.900.000,00	88,90
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	1.796.000,00	204.000,00	89,80
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000,00	1.796.000,00	204.000,00	89,80
Belanja Perjalanan Dinas	103.308.000,00	102.160.000,00	1.148.000,00	98,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.308.000,00	102.160.000,00	1.148.000,00	98,89
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.308.000,00	102.160.000,00	1.148.000,00	98,89
Penanganan Pascabencana Provinsi	304.024.350,00	271.543.097,00	32.481.253,00	89,32
BELANJA OPERASI	304.024.350,00	271.543.097,00	32.481.253,00	89,32
Belanja Barang dan Jasa	304.024.350,00	271.543.097,00	32.481.253,00	89,32
Belanja Barang	15.730.850,00	15.679.900,00	50.950,00	99,68
Belanja Barang Pakai Habis	15.730.850,00	15.679.900,00	50.950,00	99,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.937.600,00	1.937.600,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.772.200,00	1.771.800,00	400,00	99,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.465.100,00	3.463.500,00	1.600,00	99,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.355.950,00	4.307.000,00	48.950,00	98,88
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	27.750.000,00	25.850.000,00	1.900.000,00	93,15
Belanja Jasa Kantor	27.750.000,00	25.850.000,00	1.900.000,00	93,15
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	25.850.000,00	1.900.000,00	93,15
Belanja Perjalanan Dinas	260.543.500,00	230.013.197,00	30.530.303,00	88,28
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	260.543.500,00	230.013.197,00	30.530.303,00	88,28
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	260.543.500,00	230.013.197,00	30.530.303,00	88,28
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.180.495.000,00	1.119.699.215,00	60.795.785,00	94,85

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN 2018



Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	252.797.000,00	245.508.796,00	7.288.204,00	97,12
BELANJA OPERASI	252.797.000,00	245.508.796,00	7.288.204,00	97,12
Belanja Barang dan Jasa	252.797.000,00	245.508.796,00	7.288.204,00	97,12
Belanja Barang	41.547.000,00	41.499.796,00	47.204,00	99,89
Belanja Barang Pakai Habis	41.547.000,00	41.499.796,00	47.204,00	99,89
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31.315.000,00	31.315.000,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.513.700,00	1.513.696,00	4,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.732.600,00	1.729.400,00	3.200,00	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.308.800,00	1.264.800,00	44.000,00	96,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.036.900,00	3.036.900,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	67.930.000,00	60.825.000,00	7.105.000,00	89,54
Belanja Jasa Kantor	67.930.000,00	60.825.000,00	7.105.000,00	89,54
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.930.000,00	60.825.000,00	7.105.000,00	89,54
Belanja Perjalanan Dinas	143.320.000,00	143.184.000,00	136.000,00	99,91
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	143.320.000,00	143.184.000,00	136.000,00	99,91
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.320.000,00	143.184.000,00	136.000,00	99,91
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	234.863.500,00	222.147.335,00	12.716.165,00	94,59
BELANJA OPERASI	234.863.500,00	222.147.335,00	12.716.165,00	94,59
Belanja Barang dan Jasa	234.863.500,00	222.147.335,00	12.716.165,00	94,59
Belanja Barang	134.103.500,00	131.774.945,00	2.328.555,00	98,26
Belanja Barang Pakai Habis	134.103.500,00	131.774.945,00	2.328.555,00	98,26
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.350.055,00	10.891.800,00	458.255,00	95,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	674.600,00	674.600,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	873.800,00	873.800,00	0,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	727.700,00	0,00	727.700,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	118.014.745,00	118.014.745,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa	47.400.000,00	44.900.000,00	2.500.000,00	94,73
Belanja Jasa Kantor	47.400.000,00	44.900.000,00	2.500.000,00	94,73
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Paket/Pengiriman	25.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	90,00
Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	15.571.050,00	4.428.950,00	77,86
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	15.571.050,00	4.428.950,00	77,86
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	4.000.000,00	3.988.300,00	11.700,00	99,71



Apung-Alat Besar Apung Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	12.000.000,00	11.582.750,00	417.250,00	96,52
Belanja Perjalanan Dinas	33.360.000,00	29.901.340,00	3.458.660,00	89,63
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.360.000,00	29.901.340,00	3.458.660,00	89,63
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.360.000,00	29.901.340,00	3.458.660,00	89,63
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	692.834.500,00	652.043.084,00	40.791.416,00	94,11
BELANJA OPERASI	692.834.500,00	652.043.084,00	40.791.416,00	94,11
Belanja Barang dan Jasa	692.834.500,00	652.043.084,00	40.791.416,00	94,11
Belanja Barang	171.634.500,00	158.043.084,00	13.591.416,00	92,08
Belanja Barang Pakai Habis	171.634.500,00	158.043.084,00	13.591.416,00	92,08
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.536.100,00	2.500.284,00	35.816,00	98,59
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.061.200,00	2.054.800,00	6.400,00	99,69
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	755.200,00	0,00	755.200,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.440.000,00	153.488.000,00	10.952.000,00	93,34
Belanja Jasa	408.800.000,00	381.600.000,00	27.200.000,00	93,35
Belanja Jasa Kantor	408.800.000,00	381.600.000,00	27.200.000,00	93,35
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	408.800.000,00	381.600.000,00	27.200.000,00	93,35
Belanja Perjalanan Dinas	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	100,00
TOTAL	9.705.964.854,00	9.157.894.583,00	548.070.271,00	94,35

C. EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH

1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tahun anggaran 2022 melaksanakan Program Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana merupakan rangkaian penanggulangan bencana yang memfokuskan pada saat sebelum terjadinya bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Pagu anggaran awal Program Penanggulangan Bencana (Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana) sebesar Rp. 699,999,500 yang terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana



- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pada perubahan anggaran terdapat beberapa pengurangan dan penambahan anggaran sehingga di APBD Perubahan Tahun 2022, anggaran pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tersisa Rp. 502,603,600 dan realisasi anggaran mencapai 462.020.220 atau 91,92 %.

Sedangkan capaian realisasi program, bila dilihat dari indikator capaian program, yaitu :

No	Indikator Sasaran Program	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Kondisi Sebelumnya / Tahun 2021 (%)
1	Persentase Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana)	81,96	96	37,54
2	Persentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan / keterampilan / pelatihan	80,60	333,91	249,42

Capaian realisasi program dilihat dari indikator sasaran program keseluruhannya tercapai. Untuk indikator sasaran “Persentase Pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat Peduli Bencana / Destana (Desa Tangguh Bencana)” targetnya adalah 81,96 % dan tahun 2022 terealisasi 96 %, pembentukan Destana / Pokmas / Relawan di Kabupaten / Kota terus didorong oleh BPBD Provinsi agar BPBD Kabupaten / Kota mempercepat pembentukannya untuk mendukung indikator desa mandiri. Sedangkan indikator sasaran “Persentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan / keterampilan / pelatihan” targetnya 80,60 % dan realisasi keseluruhan sampai tahun 2022 mencapai 333,91 %. Hal ini karena BPBD melakukan penyebaran informasi dengan melalui website / media sosial sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan atau mengakses informasi tentang kebencanaan secara langsung sehingga



lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi, selain itu BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sering di undang oleh Dinas / Badan / Instansi lainnya sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi tentang kebencanaan.

Pada Tahun 2022 jumlah Pokmas / Destana / Kelompok Relawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat bertambah baik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota menjadi 192 Pokmas / Destana / Kelompok Relawan.

Sedangkan jumlah orang yang dilatih atau diberikan penyuluhan / sosialisasi kebencanaan baik secara langsung dan tidak langsung oleh BPBD Provinsi, Dinas / Badan / Instansi / Perguruan tinggi lainnya mencapai 13.484 orang dan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 39.807 orang sehingga jumlah orang yang telah dilatih atau diberikan penyuluhan mencapai 53.292 orang, sudah lebih dari target pada tahun 2023 yaitu 15.960 orang yang harus dilatih.

Penjelasan rinci mengenai kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dilihat dibawah ini :

1. Pengelolaan Risiko Bencana

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai perangkat daerah yang membidangi kebencanaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan resiko bencana (Pasal 35).

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana yaitu dengan melakukan pengelolaan risiko bencana melalui patroli pencegahan bencana. Kegiatan tersebut merupakan usaha dalam penguatan pencegahan, guna menghindari dan membatasi dampak negatif dari bencana yang akan terjadi.

a. Maksud dan Tujuan



Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengamanan pencegahan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh serta tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar daerah yang memiliki potensi bencana bisa teridentifikasi serta meningkatkan upaya pencegahan di daerah sehingga upaya pencegahan dapat dikendalikan.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan patroli pencegahan bencana di Kota Pontianak dan Kabupaten sekitarnya, patroli dilaksanakan di daerah yang terdapat potensi terjadi bencana baik kebakaran hutan dan lahan maupun bencana banjir atau ketika mendapatkan laporan dari masyarakat.

c. Anggaran, Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

Sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Barat (DPA – SKPD Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat) Tahun Anggaran 2022. Pagu Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini sebesar Rp. 192.739.000 dan pada APBD Perubahan anggaran tersebut bertambah menjadi Rp. 226.190.600 dan terealisasi sebesar Rp. 196.925.220 atau 87,06 % dari pagu anggaran.

2. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Karhutla di Kab. Kubu Raya dan Sintang)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian ditegaskan pada Pasal 27 Undang – Undang tersebut bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Undang - undang ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan Bencana adalah tanggungjawab



bersama yaitu antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat atau dengan kata lain Penanggulangan Bencana tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah namun juga merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengembangan desa / kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya serta memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan

Sub kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari 2 kegiatan yaitu pembentukan desa tangguh bencana (Destana) dan pengadaan sarana dan prasarana karhutla. Untuk pembentukan desa tangguh bencana (Destana) dilaksanakan oleh sub bidang kesiapsiagaan sedangkan pengadaan



sarana dan prasarana karhutla dilaksanakan oleh sub bidang pencegahan.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat di Desa / Kelurahan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengurangan Resiko Bencana.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi Pengurangan Resiko Bencana.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Pengurangan Resiko Bencana, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
- f. Memperkuat ketangguhan masyarakat di desa / kelurahan untuk mendukung desa mandiri.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di :

- Desa Rasau Jaya 2 (Kab. Kubu Raya) dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Desa Mekar Sari (Kab. Kubu Raya) dengan peserta sebanyak 40 orang.



- Desa Semelagi (Kab. Sambas) dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Desa Galang (Kab. Mempawah) dengan peserta sebanyak 40 orang.

c. Anggaran, Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

Sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Barat (DPA – SKPD Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat) Tahun Anggaran 2022. Pagu Awal Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini sebesar Rp. 507.260.500 dan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 276.413.000 dan terealisasi sebesar Rp. 265.095.000 atau 95,91 % dari anggaran.

3. Permasalahan, Kendala, Solusi Dan Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Permasalahan dan Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Pembentukan Destana)	Saat perubahan anggaran terjadi pergeseran yang awalnya destana juga akan dibentuk di Kabupaten Sintang dan Sanggau menjadi ditiadakan	Mendorong Kabupaten Sintang, Sanggau dan Kabupaten lainnya untuk secara mandiri membentuk destana menggunakan APBD Kabupaten masing-masing	

2) Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik pada tahun anggaran 2022 melaksanakan Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Kedaruratan dan Logistik merupakan rangkaian penanggulangan bencana yang memfokuskan pada saat terjadinya bencana yaitu kedaruratan dan logistik. dengan pagu awal sebesar Rp.



1.199.318.900,- kemudian terjadi pergeseran sebesar Rp. 18.823.900,- menjadi Rp. 1.180.459.000,-

Pada periode Semester 2, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp. 16.720.000,- dengan pagu awal sebesar Rp. 269.517.000,- menjadi Rp. 252.797.000,- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp.2.103.900,- dengan pagu awal Rp.236.967.400,- menjadi Rp. 234.863.500,- dan Sub Kegiatan Aktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak ada pergeseran anggaran. Realisasi anggaran mencapai 1.119.699.215,- atau 94,85 %.

Sedangkan capaian realisasi program, bila dilihat dari indikator capaian program, yaitu :

No	Indikator Sasaran Program	Target 2022	Realisasi 2022 (%)	Kondisi Sebelumnya / Tahun 2021
1	Rata-rata waktu respon time ke lokasi kejadian bencana (14 Kab/Kota)	11 Jam	11 Jam	11 Jam

Capaian realisasi program bila dilihat dari indikator sasaran program tercapai. Untuk indikator sasaran “Persentase rata-rata waktu respon time ke lokasi kejadian bencana (14 Kab/Kota) targetnya adalah 100 % Penjelasan rinci mengenai sub kegiatan yang termasuk dalam Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat dilihat dibawah ini :

1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ketahun selalu terjadi bencana dan berada di wilayah rawan bencana. Dari 14 Kabupaten/Kota tidak ada yang terhidar dari bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti: banjir, tanah longsor, putting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan pandemik yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan



lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis serta kerusakan lahan pertanian masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat dalam dan luar negeri, berupa logistik untuk penanggulangan bencana.

Menurut perka BNPB No.2 Tahun 2018 bahwa penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Instansi terkait dapat melakukan kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya sehingga dapat menentukan status keadaan darurat bencana.

Bencana Baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, maka perlu upaya Penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Dalam upaya penyelamatan tersebut perlu diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

a. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
2. Terlaksananya penanganan bencana dengan pengerahan sumberdaya dan peralatan.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu Januari – Desember 2022. Kegiatan pada semester I dilaksanakan didalam



daerah yaitu: Kabupaten Sanggau, Landak, Bengkayang, Kota Pontianak, Kubu Raya dan Kapuas Hulu. Semester II kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sintang, Melawi, Landak, Mempawah, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Ketapang dan Kota Singkawang dan Pontianak.

c. Anggaran, Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja

Sumber dana untuk kegiatan ini adalah dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022. Pagu anggaran awal sebesar Rp. 269.517.000,-, namun karena terjadi pergeseran anggaran menjadi Rp.252.797.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 245.508.796,- atau 97.12 % dan sisa anggaran sebesar Rp.7.288.204,-.

2. Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ketahun selalu terjadi bencana dan berada di wilayah rawan bencana. Dari 14 Kabupaten/Kota tidak ada yang terhidar dari bencana. Kerawanan bencana ini ditandai dengan banyaknya bencana yang terjadi seperti: banjir, tanah longsor, putting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, konflik social, pandemik dan rabies yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis serta kerusakan lahan pertanian masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat dalam dan luar negeri, berupa logistik untuk penanggulangan bencana.

Bantuan logistik diperlukan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadinya bencana. Dukungan bantuan logistic harus tepat waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan kebutuhan, untuk menjaga keselamatan dan keamanan para korban,



mereka akan diungsikan ketempat yang lebih aman. Dalam pengungsiannya tidak sedikit dari mereka yang telah kehilangan harta bendanya. Tentu saja, hal ini harus diatasi dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, barang dalam artian disini kita kenal dengan istilah logistik.

Pengadaan Bufferstock (Logistik) pada BPBD Provinsi untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kabupaten/Kota yang membutuhkan sebagai bufferstock atau penguatan kelembagaan yang dipergunakan pada saat kejadian bencana.

a. Maksud dan Tujuan

- Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan bantuan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus sebagai penguatan kelembagaan di BPBD Kabupaten/Kota.
- Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana
- Menyiapkan perencanaan kebutuhan logistik dalam penanggulangan bencana
- Mendistribusikan bantuan logistik dalam penanggulangan bencana dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan akuntabel.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Januari s.d Desember 2022. Penyediaan logistik bencana sesuai No.PO: PO-108695-220519-1 tanggal 19 Mei 2022 dengan jenis barang: Gula pasir (530 Kg), Mie Cup Merah (641 duz), Minyak goreng (265 L) dan 'teh celup (160 kotak) . Pendistribusian logistik pada semester I dilaksanakan di Kabupaten: Ketapang, Singkawang. Pada semester II distribusi logistik dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Sekadau, Sanggau, Sintang dan Melawi.

c. Anggaran, Realisasi Keuangan dan Realisasi kinerja

Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat (DPA – SKPD Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat) Tahun Anggaran 2022. Pagu Anggaran awal untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 236.967.400,-. Setelah pergeseran anggaran menjadi Rp.



234.863.500,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 222.147335,- atau 94,59 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.716.165,-

3. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumber daya alam.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Wilayah Kalimantan Barat secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud dilaksanakannya Aktivasi Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana adalah aktifnya posko bencana yang ada di provinsi untuk penanganan darurat bencana
- Memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana
- Tersedianya Informasi kejadian bencana
- Penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, afektif, efisien dan terpadu oleh semua pihak terkait.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari Januari s.d Desember 2022 dan bertempat di kantor BPBD Provinsi Kalimantan barat Jl. Adi Sucipto No.50 Pontianak. Melakukan briefing satgas udara penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari bulan Maret sampai dengan



November 2022 yang beranggotakan Instansi terkait Karhutla. Aktivasi posko kedaruratan bencana melakukan pengumpulan data laporan kejadian bencana 14 Kab/Kota se- Kalimantan Barat dan menyusun laporan yang selanjutnya diserahkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

c. Anggaran, Realisasi Keuangan dan Realisasi kinerja

Sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Barat (DPA – SKPD Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat) Tahun Anggaran 2022. Pagu Anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan ini sebesar Rp. 692.834.500,- adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 652.043.084,- atau 94,11 % dan sisa anggaran sebesar (Rp. 40.791.416,-).

4. PERMASALAHAN, KENDALA, SOLUSI DAN TINDAK LANJUT

No	Sub.Kegiatan	Permasalahan dan Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
1	<p>Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana serta koordinasi bantuan darurat bencana - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 	<p>Penanganan bencana lebih dioptimalkan</p> <p>Lokasi (lokus) bencana yang sulit dijangkau transportasi.</p> <p>Terbatasnya jumlah personel</p> <p>Terbatasnya jumlah peralatan penanggulangan bencana</p>	<p>Perlu adanya peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa dan akademisi.</p>	<p>sosialisasi manajemen bencana agar dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat</p>
2	<p>Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Penataan dan pemeliharaan Gedung logistic dan peralatan 	<p>Kurangnya pagu anggaran yang tersedia sehingga pengadaan logistic hanya dapat dilakukan dalam jumlah terbatas.</p>	<p>Peningkatan pagu anggaran</p> <p>Penyediaan pagu anggaran untuk biaya</p>	<p>Mengajukan peningkatan anggaran ditahun berikutnya</p>



	<p>- Mobilisasi peralatan dari BNPB</p>	<p>Gudang logpal yang representative tidak tersedia sementara pengecekan dan penyimpanan barang-barang perlu dilakukan secara rutin untuk menghindari kerusakan barang baik kerusakan fisik ataupun masa berlaku yang telah kadaluarsa.</p> <p>Kurangnya anggaran untuk biaya pengiriman dan distribusi logistic dan peralatan</p>	<p>pengiriman</p> <p>Tersedianya Gudang yang representative</p>	<p>Mengajukan anggaran untuk pembangunan Gudang logpal</p> <p>Mengajukan peningkatan anggaran ditahun berikutnya</p>
3	<p>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p> <p>- Briefing satgas udara penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan</p>	<p>Aktifasi posko semestinya menjadi pusat komando bencana bantingsor dan karhutla, kegiatan briefing seharusnya tersedia untuk semua bencana dan dianggarkan secara rutin selama 1 tahun</p> <p>Kurangnya SDM personil penanggulangan bencana Tim Reaksi Cepat</p>	<p>Aktifkan posko utama sebagai tempat pengambilan keputusan dalam penanganan bencana melalui kegiatan briefing, setelah ada penetapan status bencana, sehingga di siapkan dana briefing lintas sector</p> <p>Perlu peningkatan SDM personil TRC</p>	<p>Aktifkan kegiatan briefing selama ada penetapan status</p> <p>Disediakan dana rutin untuk briefing bencana selama 12 bulan</p> <p>Fungsikan SK status dan komando serta TRCPB Kalbar</p> <p>Libatkan berbagai pihak dalam kegiatan briefing agar satu komando dalam penanganan bencana.</p> <p>Mengikuti Training dan Bimtek peningkatan SDM</p>



3) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi Kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi : 3 (tiga) kegiatan, total anggaran Rp. 349.024.200,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendataan Kerusakan dan Kerugian Masyarakat di Daerah Pascabencana sebesar Rp. 140.287.800,-
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten / Kota sebesar Rp. 106.171.300,-
- Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 102.565.100,-

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 903/1333/BKAD-B tanggal 14 April 2022 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, maka Anggaran untuk Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang semula Rp. 349.024.200, menjadi Rp. 304.024.200,- atau berkurang (Rp. 45.000.000,-), dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Pendataan Kerusakan / Kerugian Masyarakat di Daerah Pascabencana di Kalbar sebesar Rp. 140.287.800,- menjadi Rp. 132.767.300,-
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pascabencana di Kabupaten / Kota sebesar Rp. 106.171.300,- menjadi Rp. 109.508.500,-
- Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Kalimantan Barat yang semula Rp. 102.565.100,- menjadi Rp. 61.748.550,-.

Realisasi keuangan dari Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada



Tahun 2022 mencapai Rp. 270.284.097 atau 88,90 %. Sedangkan capaian realisasi program, bila dilihat dari indikator sasaran program adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Kondisi Sebelumnya / Tahun 2021
1	Pendataan Kerusakan / Kerugian Masyarakat Daerah Pascabencana di Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	12 Kab/Kota
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pascabencana di Kabupaten / Kota	14 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota
3	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	0

1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	90%	100	111,11 %
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks RB PD 2. Nilai SAKIP PD	1. B 2. B	1. CC 2. B	



Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran di atas akan diuraikan berikut ini:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	90%	100%	111,11%
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB PD Nilai SAKIP PD	B B	CC B	- -
Rata Rata					111,11%

Capaian Kinerja untuk sasaran Strategis secara rata rata mencapai 111,11% yaitu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai target dimana target pada tahun 2022 adalah 90% dengan capaian 100%.

Sedangkan Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022 secara program/kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rincian Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
I.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pembentukan Destana	81,50	96,00	117,79%
		Persentase Masyarakat Yang mendapat Pengetahuan / Keterampilan / Pelatihan	80,60	333,91	414,28%
		Rata-Rata Respond Time ke Lokasi Kejadian Bencana	11 Jam	11 Jam	100%
		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Kalimantan Barat	100%	100%	100%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi yang dilakukan	100 %	100 %	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Rekonstruksi Pasca Bencana	70 %	100 %	100 %
		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Pasca Bencana	70 %	100 %	100 %
		Persentase Pelayanan Keispsiagaan Pasca Bencana	90 %	100 %	100 %
		Persentase Pelayanan Pencegahan Pasca Bencana	90%	90 %	100 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Kedaruratan Persentase Pelayana. Logistik dan Peralatan	90% 90%	100% 100%	100 % 100%
Rata Rata					100 %

Untuk capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan semuanya berhasil mencapai pernyataan kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

Sedangkan untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.718.841.904,00	7.304.632.051,00	94,63	100,00	5,37
		Program Penanggulangan Bencana	1.987.122.950,00	1.853.262.532,00	93,26	100,00	6,74
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
			9.705.964.854,00	9.157.894.583,00	94,35	100,00	5.65

Berdasarkan Sasaran Strategis target anggaran adalah sebesar Rp.9.705.964.854,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.157.894.583,00 atau 94,35% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% sehingga terdapat tingkat



efisiensi sebesar 5,65%. Sedangkan berdasarkan program dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp.7.718.841.904,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.304.632.051,00 atau 94,63% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 5,37%.
- b) Program Penanggulangan Bencana memperoleh anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp.1.987.122.950,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.853.262.532,00 atau 93,26% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 6,74%.

2). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan realisasi kinerja, seluruhnya capaian kinerja dinyatakan berhasil. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;



- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2020 dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
			2021	2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	-	100
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB PD Nilai SAKIP PD	CC CC	CC B

Realisasi kinerja Tahun 2021 dan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat di dokumen RENSTRA tahun 2019-2023 terdapat peningkatan di tahun 2022 namun untuk realisasi capaian Indeks RB masih belum mencapai target sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA BPBD Tahun 2019-2023

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dan tahun 2021 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target 2022 (RENSTRA)
			2021	2022	
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	-	100	100
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB PD Nilai SAKIP PD	CC CC	CC B	B B



Realisasi kinerja Tahun 2021 dan tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat di dokumen RENSTRA tahun 2019-2023 terdapat peningkatan di tahun 2022 namun untuk realisasi capaian Indeks RB masih belum mencapai target sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA BPBD Tahun 2019-2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1). Permasalahan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
 - a). Terjadinya bencana nasional Covid-19 yang mengakibatkan semua keterbatasan ruang gerak dan pengalihan penganggaran untuk penanganan bencana tersebut;
 - b). Adanya Efisiensi Anggaran sehingga beberapa kegiatan harus dilakukan penundaan dan pengoptimalan pelaksanaan kegiatan.
 - c). Gudang Logistik dan Peralatan BPBD masih menumpang di wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sehingga untuk pengawasan pemeliharaan tidak maksimal.
- 2). Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:
 - a). Merencanakan penganggaran khusus untuk penanganan bencana Nasional Covid-19 untuk tahun berikutnya tanpa mengurangi anggaran penanganan bencana lainnya;
 - b). Membuat Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan kebencanaan nasional yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi Sasaran serta Indikator dalam Kerangka Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Infrastruktur Penguatan tebing, Pengamanan Pantai, Penahan Lumpur, Pengendali Banjir serta Longsor;
2. Tersedianya Infrastruktur Pengamanan Pantai dan Pengendali Banjir di Kawasan pesisir utara pulau Jawa;
3. Tersedianya sistem pengendalian penurunan tanah di Kab/Kota pesisir utara Pulau Jawa
4. Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor
5. Terciptanya sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan

Untuk itu, berdasarkan Kerangka Pembangunan Nasional sub Urusan Bencana maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengacu kepada Sasaran serta Indikator yang termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BPBD Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasarnya dengan mempertimbangkan sumber daya dan



kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Tujuan dan Sasaran Strategis terutama pada misi kedua, ketiga dan keempat yang merupakan tujuan dan sasaran pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi.

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah RPD dan RENSTRA dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	IKU
1.	Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan maka diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi BPBD Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana dan waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai:

- a. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
- c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (aparatur pemerintah maupun masyarakat).
- d. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana	Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Untuk melaksanakan **sasaran** Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana, **strategi** yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi **arah kebijakan** yang dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ada indikator-indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dinamakan indikator kinerja. Program dan kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja Tahun 2024 ini memiliki indikator kinerja, antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan**, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah :
2. **Program Penanggulangan Bencana**, dengan indikator kinerja antara lain :
 - a. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
 - b. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
3. **Program Pencegahan Penanggulangan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**, dengan indikator kinerja Persentase Layanan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada RPD serta RENSTRA yang terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan dan sub kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran. Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan, akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Barat serta RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintah Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana serta Sub Urusan Kebakaran.

2. Program Penanggulangan Bencana :

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baik itu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.



3. Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT						11.005.938.020,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.005.938.020,00								0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.005.938.020,00								0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah (Nilai)</i>	-			60 Nilai	7.757.693.670,00						-	0,00		
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			7 Dokumen	246.885.995,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	140.222.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.559.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.599.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	10.598.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	49.996.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	14.308.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	5.801.937.620,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				38 Orang/Bulan	5.505.938.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	209.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				2 Dokumen	12.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	28.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				4 Dokumen	28.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	92.987.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	13.998.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	18.989.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	69.502.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalba	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	17.892.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalba		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	31.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalba		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalba		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalba		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	478.968.695,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	15.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	81.284.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	17.191.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	39.731.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	219.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	17.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	72.759.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	ASN di Lingkungan BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	775.131.760,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	198.954.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	575.476.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan / Dokumen)</i>	-			1 Laporan/Dokumen	292.280.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	149.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	38.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA (poin) INDEKS PENANGANAN TEMATIK KAWASAN (poin) INDEKS SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK (poin) INDEKS PENGKAJIAN RESIKO DAN PERENCANAAN TERPADU (poin) INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI (poin) INDEKS PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA (poin)	0.450 Poin 0.530 Poin			0.440 Poin 0.320 Poin 0.380 Poin 0.400 Poin 0.400 Poin 0.520 Poin	3.152.586.500,00						0.440 Poin 0.520 Poin	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	<i>PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA YANG DILAKUKAN (%)</i>	-			100 %	100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)														
			<i>Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota</i>	180 Orang			300 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	BPBD Prov. Kalbar	60 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA YANG DILAKUKAN (%)</i>	-			100 %	1.294.891.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Bencana	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			<i>Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	6 Kawasan			6 Kawasan	499.229.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Bencana	2 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana														
			<i>Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani</i>	3 Kegiatan			2 Kegiatan	795.661.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Bencana	1 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA YANG DILAKUKAN (%)</i>	-			100 %	1.359.985.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan Rawan Bencana	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	3 Laporan			1 Laporan	300.768.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan Rawan Bencana	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	1500 Orang			300 Orang	268.610.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan Rawan Bencana	5000 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	3 Laporan			1 Laporan	790.606.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan Rawan Bencana	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>PERSENTASE PELAKSANAAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DILAKUKAN (%)</i>	-			100 %	397.709.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Terdampak Bencana	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	297.714.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Terdampak Bencana	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>	180 Orang			80 Orang	99.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Masyarakat Terdampak Bencana	60 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE LAYANAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (%)	100 %			100 %	95.657.850,00						100 %	0,00	
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN YANG DILAKUKAN (%)</i>	-			100 %	95.657.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Aparatur BPBD dan Lintas Perangkat Daerah	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	2 Laporan			30 Laporan	95.657.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup	Aparatur BPBD dan Lintas Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
J U M L A H								11.005.938.020,00							0,00	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 (Renja 2024) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2024 – 2026. Renja 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang di Kalimantan Barat, pencapaian target RPD Kalbar 2024 – 2026 dan Program/Kegiatan yang direncanakan benar-benar memiliki keluaran yang cepat dan dibutuhkan masyarakat harus menjadi prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, serta yang terpenting mengacu pada perubahan-perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disusun ini masih banyak perlu penyempurnaan baik kegiatan-kegiatan maupun besaran pagu indikatifnya guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Pontianak, Juni 2023
KEPALA BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH



Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE., ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199311 1 002